

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Proses demokratisasi di Indonesia pasca orde baru telah menghasilkan desain sistem politik yang sangat berbeda secara signifikan dengan desain yang dianut selama masa orde baru. Reformasi prosedural dan kelembagaan yang walau dilakukan secara bertahap, telah mengubah landasan berpolitik secara sangat radikal.

Perkembangan dunia politik di Indonesia terus berkembang seiring dengan reformasi terhadap produk hukum, pemerintahan, maupun kebebasan pers. Dalam skala nasional dapat kita lihat pada pemilihan umum 2004 dan 2009 yang dilaksanakan secara langsung. Pemilu merupakan momen terbesar demokrasi. Terbesar dari segi anggaran yang harus dikeluarkan, terbesar gesekan politiknya, dan terbesar pengaruhnya terhadap keberlanjutan pembangunan sosial politik suatu negara. Dalam sistem Pemilu di Indonesia yang baru, ada beberapa jenis penyelenggaraan Pemilu, salah satunya pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota serta DPD.

Diawali dengan Pemilu Legislatif yang berlangsung tanggal 9 April 2009 ternyata masih meninggalkan berbagai persepsi didalam masyarakat. Pesta demokrasi yang merupakan proses demokrasi pemerintahan di Indonesia ini,

ternyata banyak meninggalkan tanda tanya besar. Banyaknya kesalahan dalam proses penyelenggaraan Pemilu ini menjadi sebuah pekerjaan rumah yang sangat berat, kesalahan-kesalahan seperti kacaunya Daftar Pemilih Tetap (DPT), surat suara yang tertukar, dan kesalahan cetak surat suara.

Berbicara mengenai pemilu, salah satu instrumen yang sangat penting didalamnya adalah Partai Politik. Partai politik merupakan kendaraan politik bagi para calon anggota legislatif untuk memperoleh mandat dari rakyat untuk menjadi wakilnya diparlemen. Sebuah Partai politik tidak hanya dikelola oleh satu orang karena partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung.

Sebagai agen demokrasi partai politik mempunyai tugas yang tidak ringan, Penyaluran aspirasi kontitusi dan merubahnya menjadi kebijakan publik yang bertanggung jawab menjadi tugas utama para pemegang kekuasaan. Selain itu ada tugas yang tak kalah penting yang harus diemban oleh partai politik yaitu melakukan kaderisasi setelah melalui proses rekrutmen politik. Semua tanggung jawab ini sangat penting untuk bisa diemban dengan baik oleh partai politik apabila proses demokrasi di Indonesia benar-benar bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda dimana pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya.

Pembahasan menarik tentu tentang peran dan fungsi pemerintah dalam memposisikan dirinya secara proporsional dan juga kemampuan partai politik untuk mengatur dirinya sendiri dan kemampuan untuk mempertahankan dominasi perannya dari intervensi kekuasaan .

Persoalan kaderisasi ini dikatakan sebagai persoalan penting karena sesungguhnya didalam partai perlu digodok pemimpin lokal maupun pemimpin nasional yang memiliki visi demokrasi dan bermental jujur. Untuk itu, sangat perlu dan mendesak bagi partai politik terutama para ketua umumnya untuk segera memikirkan langkah-langkah strategis yang bisa merubah keadaan ini. Mereka harus segera melakukan perombakan mendasar terhadap sistem rekrutmen politik didalam partai politik yang mereka pimpin sehingga bisa mendukung proses kaderisasi pemimpin nasional.

Idealnya sebuah partai politik menominasikan calon anggota legislatif yang telah bergabung dengan partai politik beberapa tahun sebelum pemilu. Dengan demikian proses inisiasi sang calon anggota legislatif dengan partai politik telah berlangsung baik. Partai politik mengenal calon anggota legislatif tersebut dengan baik dan calon anggota legislatif pun telah menyatu dengan ideologi, visi, misi, dan program partai politik dengan baik.

Calon anggota legislatif seharusnya tersaring melalui proses perekrutan berdasarkan kriteria yang demokratis, objektif terukur, memperhatikan keahlian, dan bebas dari korupsi, gratifikasi, kolusi, serta nepotisme dengan alasan ketika calon anggota legislatif harus memperjuangkan visi, misi dan program partai

politik, sang calon tidak merasa dilematis karena telah mengetahui konsekuensi menjadi bagian dari partai politik.

Partai Golkar dalam merekrut seorang anggota legislatif menetapkan beberapa kriteria 4 (empat) yaitu: *Pertama*, memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas sebagai anggota legislatif; *Kedua*, memiliki pengabdian dan rekam jejak yang baik selama aktif di Partai Golkar; *Ketiga*, memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela (PD2LT); dan *Keempat*, Memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh undang-undang. (pedoman penyusunan daftar calon anggota DPR-RI, DPRD propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Partai Golkar, 2013:4)

Partai politik tanpa kaderisasi tidak berarti apa-apa, partai politik membutuhkan regenerasi. Regenerasi pasti dilakukan tetapi untuk memperoleh hasil regenerasi yang baik maka dibutuhkan proses kaderisasi yang sistematis dan penanganan yang khusus.

Sistem kaderisasi akan berjalan baik jika semua pihak yang saling terkait saling bantu-membantu dan bekerja sama dalam membentuk pola pengkaderan. Dibutuhkan kerjasama antara pihak yang melakukan pengkaderan terhadap anggota baru partai, yaitu pihak yang diajak untuk menjadi kader maupun unsur pendukung lainnya yang dibutuhkan, misalnya seperti materi yang mampu membentuk pola berfikir dan bekerja seorang kader sesuai dengan tujuan partai politik yang bersangkutan. Bila partai politik mampu menghasilkan kader partai

yang berkualitas, berarti partai politik mampu menyediakan pemimpin nasional masa depan yang berkualitas pula.

Apabila proses kaderisasi ini macet, maka transisi kepemimpinan dari generasi tua kepada generasi yang lebih muda juga akan macet. Kemandekan proses kaderisasi didalam partai politik ini telah menimbulkan kekecewaan yang dalam dibanyak kalangan. Kekecewaan ini diwujudkan dengan pembentukan partai-partai politik baru dan munculnya wacana calon perseorangan ditengah keinginan kolektif membangun sebuah sistem demokrasi perwakilan yang memposisikan partai politik sebagai satu-satunya agen perubahan.

Seperti halnya partai politik pada umumnya, partai Golkar dalam hal memilih calon anggota legislatif haruslah seorang individu yang mengerti tentang azas, idiologi, platform, peraturan partai dan juga merupakan orang yang dikehendaki oleh rakyat atau para konstituen. Hal ini dapat dimengerti karena seorang calon anggota legislatif jika terpilih nantinya haruslah memperjuangkan kepentingan partai yang mengusungnya. Dengan demikian ini akan menjamin tetap sterilnya tujuan besar partai dari kepentingan-kepentingan orang yang tidak memahami arah dan perjuangan partai Golkar. Dan partai Golkar juga akan terhindar dari para kutu loncat/oportunis partai.

Kenyataannya, pada pemilu 2009 terlihat calon anggota legislatif dari partai Golkar untuk daerah pemilihan Kabupaten Penajam Paser Utara bukanlah seorang kader atau anggota partai Golkar, tetapi berasal dari partai politik lain seperti Abdul Rais yang dulunya adalah seorang kader dari Partai Amanat

Nasional (PAN) tahun 2004 dan pada tahun 2009 pindah kepartai Golkar. Dan pada tahun 2014 nanti Abdul Raiz akan menjadi Calon anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).(sumber hasil wawancara ketua harian Partai Golkar).

Dikatakan sebuah kaderisasi berhasil ketika dari proses kaderisasi tersebut mampu menciptakan pribadi yang tangguh dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap partai, sehingga antara dirinya dan partai merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dan mampu menjadi solusi dari masalah-masalah yang muncul bagi partai dikemudian hari. Keberhasilan partai politik dalam melakukan proses rekrutmen politik yang bisa menghasilkan kader-kader muda yang handal akan dengan sendirinya menghapuskan kekecewaan publik.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari gambaran latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan di angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sistem kaderisasi yang dilakukan oleh partai Golkar di Kabupaten Penajam Paser Utara?
2. Bagaimana proses penetapan calon anggota legislatif yang dilakukan oleh Partai Golkar di Kabupaten Penajam Paser Utara?
3. Pernahkah partai Golkar menetapkan calon anggota legislatif yang bukan dari kader Golkar? Jika pernah apa yang menjadi pertimbangannya?

4. Bagaimana strategi partai dalam menjaga kader-kadernya agar tidak pindah ke partai lain?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses sistem kaderisasi yang dilakukan oleh partai Golkar di Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Untuk mengetahui proses penetapan calon anggota legislatif yang dilakukan oleh partai Golkar di Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Untuk mengetahui pertimbangan partai Golkar dalam menetapkan calon anggota legislatif dari orang yang non kader partai Golkar.
4. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh partai Golkar agar kader-kadernya tidak pindah ke partai-partai lainnya.

### **1.4 Manfaat penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk :

1. Memberikan kontribusi ilmu pengetahuan khususnya ilmu politik tentang proses pengkaderan dan penetapan Calon anggota legislatif yang dilakukan oleh partai politik, khususnya partai Golkar di Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Memberikan bacaan ilmiah di lingkungan kampus Fisip Unmul dan dapat menjadi referensi lebih lanjut untuk bidang penelitian yang berhubungan dengan proses pengkaderan dan penetapan Calon anggota Legislatif.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran kepada seluruh kalangan khususnya masyarakat umum dibidang kajian yang dilakukan oleh partai politik.